

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	2
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media : Radar Sampit Halaman : 04

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

Benahi Pengelolaan Aset Daerah

SAMPIT - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hairis Salamad menyarankan untuk mendata ulang aset-aset milik pemerintah daerah agar bisa dioptimalkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.



HAIRIS SALAMAD

"Saya merasa miris karena masih banyak aset daerah yang belum dilaporkan atau belum terdata. Salah satu contoh, GOR di Parenggean, informasinya belum masuk catatan aset daerah," kata Hairis.

Aset lainnya yang disoroti Hairis adalah lahan terminal di Parenggean yang dulunya disebutkan luasannya sekitar dua hektare, namun sekarang tersisa 30x60 meter.

"Ini perlu ditelusuri kembali kondisi yang sebenarnya agar ada kejelasan," ujarnya.

Hairis sengaja menyoroti masalah pengelolaan aset daerah karena menurutnya perlu dibenahi. Selain itu, pengelolaan aset juga menjadi salah satu masalah yang sering disoroti oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia setiap tahunnya.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN), setiap aset yang dimiliki pemerintah daerah harus tercatat dengan baik. Legalitas semua aset yang dimiliki juga harus jelas agar mempunyai kekuatan hukum.

Inventarisasi dan pendataan ulang aset tidak boleh dianggap sepele. Jika diabaikan, dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan masalah yang merugikan pemerintah daerah.

"Kalau perkembangan dan perekonomian bagus, mungkin saja aset hilang karena diperjualbelikan. Nanti 10 atau 15 tahun kedepan akan jadi masalah kalau aset tidak tercatat. Ini harus kita selamatkan," ujar Hairis.

Hairis menambahkan, pemerintah daerah juga harus tegas jika ada aset pemerintah yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak seperti pihak ketiga, pensiunan dan lainnya. Tindakan tegas perlu dilakukan untuk menyelamatkan aset pemerintah daerah agar tidak sampai hilang. (ang/fm)